

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

##### **1. Kamal Pasha, 2018**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di SKPD kabupaten Grobogan dan metode penelitian yang di gunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Adapun persamaan dari penelitan terdahulu dan penelitan sekarang yaitu:

- a. Menggunakan data primer
- b. pengumpulan data melalui kuisisioner

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen di

antaranya standar akuntansi pemerintahan, pengelola keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi. Sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu sistem akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal.

- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah SKPD di Kabupaten Grobogan sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang di gunakan adalah SKPD di Kabupaten Manggarai Timur.

## **2. Yaqin & Jatmiko, 2018**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kontribusi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kontribusi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang di sampaikan kepada 100 pegawai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD). Metode analisis data yang di gunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan data primer
- b. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut

- a. Pada penelitian terdahulu analisis data menggunakan software SPSS sedangkan pada penelitian sekarang analisis data menggunakan PLS
- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah SKPD Kabupaten Biak Numfor sementara pada penelitian sekarang sampel yang di gunakan yaitu SKPD Kabupaten Manggrai Timur

### **3. Febrian Haty Ramadhan, 2018**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan kompetensi staf akuntansi sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh staf akuntansi pada SKPD kota Surakarta. Metode analisis data yang di gunakan adalah analisis linera berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun persamaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer
- b. pengumpulan data menggunakan kuisioner

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan kompetensi staf akuntansi sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu sistem akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal
- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah seluruh staf akuntansi pada SKPD Kota Surakarta sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang digunakan adalah SKPD Kabupaten Manggarai Timur.

#### 4. (Indrayani & Widiastuti, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan Kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini

adalah pegawai SKPD kabupaten yang berjumlah 88 orang. Metode analisis yang di gunakan adalah moderated regression analisis (MRA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dalam memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun persamaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer
- b. Penggunaan variabel sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel dependen

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu kompetensi sumber daya manusia di gunakan sebagai variabel moderasi sedangkan pada penelitian sekarang kompetensi sumber daya manusia di gunakan sebagai variabel independen
- b. Pada penelitian terdahulu metode analisis yang di gunakan adalah Moderated Regression analysis (MRA) sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan metode analisis linear berganda
- c. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah SKPD kabupaten Klaten sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang di gunakan adalah SKPD Kabupaten Manggarai Timur

## 5. Binawati, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel dependen. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi pada SKPD pemerintah kabupaten klaten sebanyak 24 dinas. Metode analisis yang di gunakan adalah analisis regresi linear berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian inten dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Adapun persamaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer
- b. pengumpulan data menggunakan kuisisioner

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu variabel indpenden yang di gunakan adalah sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaat teknologi informasi sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu sistem

akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern.

- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah dinas SKPD Kabupaten Klaten sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang di gunakan adalah SKPD Kabupaten manggarai timur

#### **6. Aziyah & Yanto, 2022**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi sebagai variabel independen, kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating. Populasi dan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil negara yang bekerja pada bagian keuangan OPD kabupaten Batang yang berjumlah 88 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun persamaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer
- b. Pengambilan data menggunakan kuisioner

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu kompetensi sumber daya manusia di gunakan sebagai variabel moderating sedangkan pada penelitian sekarang kompetensi sumber daya manusia di gunakan sebagai variabel independen
- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah aparatur sipil negara yang bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Batang sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang di gunakan adalah SKPD Kabupaten manggarai timur.

#### **7. Fauzi Isnaen, 2021**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem infoemasi akuntansi, penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem infoemasi akuntansi, penerapan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kepala bagian akuntansi di organisasi perangkat daerah (OPD) wilayah jakarta barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.



Adapun persamaan dari penelitian sekarang dan sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer
- b. Penyebaran data menggunakan kuisisioner

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem informasi akuntansi, penerapan sistem pengendalian intern sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu sistem akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal.
- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah organisasi perangkat daerah (OPD) wilayah jakarta barat sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel SKPD Kabupaten Manggarai Timur

#### **8. Sujana *et al.*, 2020**

Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan good village governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan database responden penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pengisian kuesioner dan dilakukan uji regresi linier berganda untuk memperoleh hasil penelitian. Jumlah sampel yang digunakan adalah 30 kepala desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat di Kabupaten

Buleleng. Penentuan sampel dibantu dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara sistem pengendalian intern dan good village governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern dan good village governance berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Buleleng, Bali Indonesia.

Adapun persamaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer
- b. Menggunakan kuisioner

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu variabel independen yaitu sistem pengendalian internal sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan tiga variabel independen yaitu sistem akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal
- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah 30 kepala desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat di Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian sekarang sampelyang di gunakan adalah SKPD kabupaten Manggarai Timur.

## 9. Hidayah, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Komitmen Organisasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Komitmen Organisasi sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangang sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini menggunakan SKPD Banten. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini metode analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Ada pun persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengambilan data menggunakan kuisisioner
- b. Menggunakan data primer

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan empat variabel indepen yaitu penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan

Komitmen Organisasi sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu sistem akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal

- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah SKPD banten sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang di gunakan adalah SKPD Kabupaten Manggarai Timur.

#### **10. Muthaher, 2019**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintah, kapasitas manusia, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Semarang. variabel yang digunakan pengaruh sistem akuntansi pemerintah, kapasitas manusia, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di kota Semarang. Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan, kemampuan sumber daya manusia sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun persamaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

- a. Menggunakan data primer
- b. Pengambilan data menggunakan kuisioner

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dan penelitian sebelumnya di

antaranya sebagai berikut

- a. Pada penelitian terdahulu menggunakan empat variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan, kemampuan sumber daya manusia sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal
- b. Pada penelitian terdahulu sampel yang di gunakan adalah SKPD kota Semarang sedangkan pada penelitian sekarang sampel yang di gunakan adalah SKPD Kabupaten Manggarai Timur.

**tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Tahun Penelitian Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kamal Pasha, 2018	Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
2	Yaqin & Jatmiko, 2018	Untuk menguji kontribusi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Indrayani & Widiastuti, 2020	Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kompetensi sumber

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Tahun Penelitian Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		sumber daya manusia sebagai variabel moderasi	daya manusia berpengaruh positif dalam memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Binawati, 2022	Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian inten dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
5	Febrian Haty Ramadhan, 2018	Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6	Widiatul Aziyah, 2022	Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi pengaruh antara sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan
7	Fauzi Isnaen, 2021	Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem informasi akuntansi, penerapan sistem	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Tahun Penelitian Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan	dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
8	Sujana <i>et al.</i> , 2020	Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan good village governance terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia	Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern dan good village governance berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Buleleng, Bali-Indonesia
9	Hidayah, 2018	Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Komitmen Organisasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
10	Muthaher, 2019	untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintah, kapasitas manusia, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota semarang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan, kemampuan sumber daya manusia sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 *Stewardship theory*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *stewardship*.

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) dan menggambarkan bahwa manajemen tidak dikuasai oleh tujuan individu, melainkan lebih fokus pada hasil yang menguntungkan organisasi. Teori ini didasarkan pada

asumsi filosofis tentang sifat manusia yang memiliki integritas, bertindak secara bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan berperilaku jujur untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam konteks akuntansi sektor publik, akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkapkan segala informasi yang ada, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut.

Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan yaitu perilaku *self serving* dan *pro-organizational*. Kesempatan yang diberikan kepada *stewards*, dibatasi oleh adanya persepsi utilitas yang didapatkan dari orang yang memiliki sikap *pro-organizational* akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan orang yang memiliki sikap individual atau *self serving* (Lativa Ulisanti, 2021). Hal tersebut menandakan bahwa perilaku *stewards* tidak dapat dipisahkan dari kepentingan organisasi yang membuat perilaku para eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principals* dimana para *stewards* tersebut berada. Kemudian untuk perilaku *self-serving* akan diarahkan kepada perilaku yang lebih kooperatif. Sehingga, jika terdapat perbedaan kepentingan antara *stewards* dan *principals*, maka *stewards* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. *Stewards* sendiri merasa bahwa kepentingan bersama dengan perilaku *principals* merupakan pertimbangan yang rasional karena melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Donaldson & Davis, 1991).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini dapat menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk menampung



aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan dengan baik dan berkualitas yang diamanahkan kepada pemerintah daerah, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Teori *stewardship* dapat menjadikan pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan yang akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan rakyat.

### **2.2.2 kualitas laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang termasuk dalam PSAP 01 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), laporan keuangan digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara oleh presiden selaku kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, serta oleh gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada dasarnya, laporan keuangan pemerintah adalah pernyataan dari pihak manajemen pemerintah yang memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Bastian (2010:9) mendefinisikan mutu laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang

berkepentingan. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan kesesuaian dengan karakteristik kualitatif yang menunjukkan ukuran normatif dalam informasi akuntansi, sehingga tujuan dapat tercapai. Berikut ini adalah karakteristik kualitatif yang diperlukan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah memenuhi standar kualitas yang diinginkan, (BPK, 2010) yaitu:

#### 1. Relevan

Dalam laporan keuangan adalah informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Oleh karena itu, keterkaitan informasi laporan keuangan yang relevan dengan tujuan penggunaannya sangat penting:

1. Mempunyai Nilai Umpan Balik (*Feedback Value*) Informasi memberikan kesempatan bagi pengguna untuk memperjelas atau memperbaiki harapan mereka tentang masa lalu.
2. Mempunyai Nilai Prediksi (*Predictive Value*) Informasi dapat membantu pengguna memprediksi masa depan berdasarkan hasil dan kejadian saat ini.
3. Tepat Waktu Informasi disajikan dalam waktu yang tepat sehingga dapat berdampak dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan sejelas

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Informasi yang mendasari setiap informasi utama yang terdapat dalam laporan diungkapkan dengan jelas sehingga kesalahan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dihindari.

## 2. Andal

keterpercayaan, keandalan, dan kejujuran dalam penyajian setiap fakta yang dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material agar dapat dipercaya oleh pengguna informasi. Meskipun informasi tersebut relevan, namun jika tidak dapat diandalkan maka penggunaannya dapat menyesatkan. Oleh karena itu, informasi yang jujur dan dapat diverifikasi merupakan karakteristik penting dari laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi yang berlaku:

1. Penyajian jalur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya di sajikan atau secara wajar dapat di harapkan untuk di sajikan
2. Dapat diverifikasi (*Verifiability*) Data yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diverifikasi, dan jika verifikasi dilakukan oleh pihak yang berbeda secara berulang-ulang, kesimpulannya tetap sama.
3. Netralis Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama di setiap tahunnya. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan. Perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum.

1. Pemerintah pusat
2. Kementerian dan lembaga negara
3. Pemerintah daerah
4. Badan layanan umum

Pada lingkungan pemerintah daerah, unit pemerintahan yang termasuk dalam entitas pelaporan meliputi pemerintah daerah dan badan umum layanan daerah (BLUD) karakteristik entitas pelaporan adalah:

- a. Dibiayai oleh anggaran pemerintah atau mendapatkan pemisahan kekayaan dari anggaran
- b. Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
- c. Di pimpin oleh pejabat pemerintah yang di angkat atau pejabat negara yang di tujuk atau di pilih oleh rakyat
- d. Membuat pertanggungjawaban kepada wakil rakyat.

Menurut baldric siregar (2015) jenis laporan keuangan daerah berdasarkan kategori penganggaran, laporan keuangan keuangan dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Laporan pelaksanaan anggaran, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. seperti, laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL)
- b. Laporan finansial, yaitu laporan yang bukan dalam rangka pelaksanaan anggran. Seperti, laporan oprasional (LO), Neraca, laporan arus kas (LAK) dan Catatan atas laporan keuangan (CaLK))

Laporan keuangan disusun untuk berbagai peran . peran laporan keuangan meliputi:

- a. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya manusia
- b. Manajemen, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengelolaan dan pengendalian
- c. Transparasi, yaitu pemebrian informasi yang terbuka bagi pemakai laporan keuangan
- d. Keseimbangan antar generasi, yaitu memberi informasi kecukupan penerimaan sehingga pendaan yang terlalu besar tidak harus di tanggung oleh generasi yang akan datang
- e. Evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi seberapa baik sumber daya yang di gunakan

### **2.2.3 Sistem Akuntansi Keuangan**

Menurut Erlina (2013:6), mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dapat diartikan sebagai "sistem pencatatan, penggolongan, interpretasi, ringkasan transaksi atau peristiwa keuangan, dan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)." Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari serangkaian sistem mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pihak luar atau internal pemerintah daerah dalam pengambilan

keputusan ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005, 2009 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan secara terperinci bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi segala prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, penyusunan laporan keuangan dan operasional pemerintah.

Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah pada tahun 2004 yang diterbitkan oleh Salemba Empat, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu sistem akuntansi di mana terdapat proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka melaksanakan APBD, yang dilakukan dengan berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum.

#### 1. Metode pencatatan sistem akuntansi Keuangan daerah

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, terdapat tiga metode pencatatan, yaitu *Single entry*, *Double entry* dan *Triple entry*. Saat ini, metode pencatatan *single entry* sudah makin ditinggalkan walaupun ada beberapa area Pemda yang masih menggunakannya. Hal tersebut terjadi karena metode *single entry* memiliki beberapa kelemahan seperti tidak mampu mencerminkan performa secara riil dan tidak mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, metode *double entry* diciptakan untuk menutupi kelemahan dari metode *single entry*.

##### a. *Singel entry*

Dari banyaknya sistem pencatatan buku yang ada, salah satunya

adalah pencatatan buku tunggal atau *single entry*. Sistem ini hanya mencatat transaksi ekonomi sebanyak satu kali saja. Akibatnya, pemasukan kas di input dalam kolom penerimaan dan pengurangan kas di input dalam kolom pengeluaran. Kelebihan dari sistem *single entry* ini adalah mudah dipahami dan sederhana. Namun, sistem ini kurang cocok untuk laporan karena sulit mencari kesalahan pembukuan dan mengontrol keuangan.

*b. Double entry*

Pada dasarnya, cara mencatat dengan sistem pencatatan *double entry* masih sama dengan metode pencatatan debit-kredit dalam prinsip akuntansi umum. Namun, perbedaannya terletak pada rumus persamaan dasar akuntansi yang digunakan dalam lingkup keuangan daerah. Rumus persamaan dasar tersebut adalah "belanja + aset = kewajiban + ekuitas + pendapatan". Selain itu, pencatatan dengan metode *double entry* juga menggunakan basis kas modifikasi. Ini berarti bahwa pencatatan akuntansi hanya dilakukan untuk penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan pencatatan yang berasal dari sumber di luar penerimaan dan pengeluaran kas akan dicatat pada basis akrual.

*c. Triple entry*

Metode pencatatan *Triple entry* merupakan pengembangan dari metode *Double entry*. Meskipun prinsipnya hampir sama dengan *Double entry*, namun terdapat tambahan pencatatan pada buku anggaran. Dalam *Triple entry*, selain pencatatan yang dilakukan oleh PPK SKPD dan



SKPKD, terdapat juga pencatatan tambahan. Dengan kata lain, *Triple entry* melakukan pencatatan yang lebih lengkap dibandingkan dengan *Double entry*

2. Tujuan dan fungsi sistem akuntansi keuangan daerah

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sistem akuntansi pemerintah yang memberikan informasi terkait keuangan dengan akurasi, sesuai dengan waktu dan format yang tepat, serta bermanfaat untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dengan operasi unit pemerintah. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini mewajibkan setiap pegawai atau badan pengelola keuangan negara untuk memberikan tanggung jawab dan perhitungan atas laporan keuangan yang dihasilkan.

b. Manajerial

Pengelolaan keuangan daerah akan dapat menyajikan berbagai informasi keuangan yang dibutuhkan untuk merencanakan anggaran, melaksanakan, memantau, mengendalikan anggaran, merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan, serta mengevaluasi kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Pengelolaan keuangan daerah harus dapat mengadakan audit oleh pegawai pengawasan fungsional dengan cara yang efisien dan efektif.

d. Menjaga aset

Sistem pembukuan ini dapat dipakai untuk memelihara harta K/L/PD

melalui cara pencatatan, pengolahan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar serta praktik pembukuan yang dapat diterima secara umum.

#### **2.2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut (Dedi Rianto Rahadi, 2021) Kompetensi dapat digambarkan sebagai gabungan keterampilan, pengetahuan dan atribut untuk menghasilkan pekerjaan/tugas dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah seperangkat karakteristik dan keterampilan yang dapat dibuktikan yang memungkinkan, dan meningkatkan efisiensi, kinerja pekerjaan.

Kompetensi bukanlah keterampilan (*skill*), meskipun serupa dengan keterampilan yang dipelajari, sedangkan kompetensi adalah kualitas yang melekat pada individu. Meliputi keterampilan, pengetahuan dan kemampuan. Selama wawancara kerja dan penilaian, kompetensi digunakan sebagai tolok ukur yang digunakan oleh penilai untuk mengevaluasi kandidat.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, SKPD harus memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan ambang batasnya. Pengaturan batas kualifikasi ini dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan seleksi, perencanaan suksesi, evaluasi kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Kualifikasi merujuk pada kemampuan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan oleh situasi kerja. Untuk memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan perannya, seorang profesional akuntansi harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) keterampilan profesional, (c) nilai, etika, dan sikap profesional. Kualifikasi merupakan karakteristik dasar individu yang

mempengaruhi efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau memiliki kinerja yang optimal di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Keputusan kepala badan kepegawaian Negara RI Nomor 6 tahun 2021 menyebutkan bahwa Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dapat dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang mengelola urusan manajemen sumber daya manusia aparatur (Negara *et al.*, 2021). tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama untuk menentukan kompetensi yaitu sebagai berikut

a. pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya. Informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan merupakan hal yang penting karena menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Sehingga pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan

b. keterampilan (*Skil*)

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan organisasi kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal. Jika seorang

pegawai memiliki keterampilan yang baik dalam kemampuan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok tentu hal tersebut sangat diperlukan bagi seorang pegawai. Selain itu, kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi juga sangat diperlukan.

c. Sikap (*Attitude*)

Tindakan atau pola tingkah seorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan organisasi. Apabila pegawai memiliki sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dijalankan sebaik-baiknya.

### **2.2.5 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar dapat mencapai visi dan misi tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, handal dalam pelaporan keuangan, inventarisasi asset negara, serta taat pada peraturan perundang - undangan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 5 (lima) unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Pelaksanaan SPIP yang baik juga ditunjang dengan sumber daya manusia yang handal sebagai pondasi untuk membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi.

Dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP, pada Pasal 13 PP 60 Tahun

2008 dijelaskan, bahwa pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Setelah itu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan. Dari hasil pemetaan risiko akan didapat gambaran risiko dari masing - masing unit kerja atau subbagian secara visual, sesuai dengan nilai dalam matriks peta risiko. Selanjutnya akan diketahui dari matriks informasi keberadaan risiko tersebut. Pelaporan SPIP tidak hanya membentuk mekanisme kelengkapan administratif semata, tetapi juga merupakan upaya pengendalian mekanisme kerja dengan mempertimbangkan risiko yang ada. Untuk itu, dalam pengimplementasiannya diperlukan komitmen, teladan, niat, dan kemauan yang baik dari lingkup pimpinan serta pegawai agar tujuan, visi, dan misi organisasi dapat tercapai.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh pegawai dan pimpinan guna menjamin pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memuat definisi sistem pengendalian intern sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan, efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, komponen dalam SPI ini mengacu pada langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangannya dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparansi. SPIP terdiri dari beberapa unsur antara lain (Www.Hukumonline.Com, 2008) :

#### 1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian memberikan gambaran mengenai keseluruhan sikap organisasi yang memberikan dampak kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Seluruh pihak yang berada di instansi tanpa terkecuali harus memiliki kewajiban dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat, yang dapat dicerminkan melalui perilaku yang positif dan kondusif dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. Penerapan integritas dan nilai etika yang kuat
- b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi
- c. Kepemimpinan yang memfasilitasi pengendalian yang efektif
- d. Struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan
- e. Delegasi wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Pembuatan dan penerapan kebijakan yang sehat untuk pengembangan sumber daya manusia
- g. Pelaksanaan peran pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Membangun hubungan yang baik dengan instansi pemerintah

terkait.

## 2. Penilaian Risiko

Dalam penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah selanjutnya mengidentifikasi secara efisien dan efektif terkait risiko apa saja yang dapat menghambat segala aspek pencapaian tujuan tersebut, dimana pengendalian intern berperan untuk memberi penilaian risiko yang dihadapi baik bersumber dari dalam maupun luar instansi. Dalam hal ini, penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi Risiko Melakukan efektivitas dan efisiensi pengidentifikasian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik bersumber dari internal maupun eksternal instansi.
- b. Analisis Risiko Melakukan penentuan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi

## 3. Kegiatan Pengendalian

Dalam aspek kegiatan pengendalian, tentu didalamnya terdapat peran untuk membantu memastikan arah pelaksanaan pimpinan instansi pemerintah. Instansi diwajibkan menyelenggarakan kegiatan pengendalian secara efektif dan efisien sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tupoksi. Kegiatan pengendalian tersebut terdiri dari:

- a. Tinjauan terhadap kinerja instansi pemerintah yang terkait

- b. Pengembangan sumber daya manusia
  - c. Pengawasan terhadap pengelolaan sistem informasi
  - d. Pengawasan fisik terhadap aset
  - e. Penetapan dan evaluasi terhadap indikator dan ukuran kinerja
  - f. Pemisahan tugas
  - g. Pemberian wewenang atas transaksi dan kejadian penting
  - h. Pencatatan yang tepat dan akurat atas transaksi dan kejadian
  - i. Pembatasan akses dan pencatatan sumber daya
  - j. Pertanggungjawaban atas sumber daya dan pencatatan
4. Informasi dan komunikasi

Setiap instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Instansi diwajibkan melakukan pengidentifikasian, pencatatan, pengkomunikasian dan pelaporan dalam bentuk dan sarana tertentu serta dengan waktu yang tepat. Dalam hal ini informasi dan komunikasi terdiri atas:

- a. Komunikasi atas informasi yang efektif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif.
- b. Dalam penyelenggaraan komunikasi yang efektif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi pemerintah sekurang-kurangnya harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dengan melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus.



## 5. Pemantauan

Dalam proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian intern dilaksanakan melalui proses pemantauan berkelanjutan, evaluasi secara terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pada aspek pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Dalam evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan agar sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang telah ditetapkan.

### **2.3 Hubungan Antara Variabel**

#### **2.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban entitas publik yang berisi informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat. Laporan keuangan digunakan bagi pihak yang berkepentingan dalam berbagai hal. Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang

handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009 dalam Lutfiyanti, 2018).

Sistem akuntansi keuangan daerah ialah salah satu sub sistem organisasi yang memudahkan pengawasan dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Cakupan sistem akuntansi keuangan daerah meliputi kebijakan, prosedur, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Ratifah & Ridwan, 2012) serta menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan laporan keuangan berkualitas. Hasil penelitian Wati dkk (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2014) juga memberikan informasi bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berdampak positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, jika sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik sejak awal, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik (Roviyantie, 2011).

Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh (Defitri, 2018) Sistem akuntansi keuangan daerah erat kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada periode tertentu untuk mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan jadi lebih baik dan berkualitas.

Penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sistem ini berperan dalam mendokumentasikan dan mengolah

keuangan daerah serta data terkait, dari proses pencatatan hingga pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem ini, penggunaan anggaran dapat dipantau dan dikendalikan secara lebih efisien dan efektif seperti dalam mengumpulkan data, mencatat, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan menjadi informasi yang disampaikan kepada publik dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tanggung jawab. Dengan menggunakan sistem akuntansi, risiko kesalahan dan kekeliruan dapat diminimalkan dalam pencatatan dan perhitungan, sehingga pemerintah daerah dapat menghindari risiko yang lebih besar (Defitri, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamal Pasha 2018, Yaqin & Jatmiko 2018, Indrayani & Widiastuti, 2020 dan Binawati, 2022 sistem akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **2.3.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Kompetensi SDM adalah kemampuan seorang karyawan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya dengan efisien dan efektif, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. SDM yang kompeten akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi SDM sangatlah penting dalam hal menyajikan dan mengelola informasi keuangan, terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang tepat waktu. Selain SDM yang kompeten, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. (Putri Sartika, 2020).

Kompetensi Sumber daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat

penting bagi sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saat ini, terdapat pandangan baru yang menyatakan bahwa karyawan bukan hanya sebagai tenaga kerja semata, melainkan lebih sebagai modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Oleh karena itu, muncul istilah baru di luar H.R. (Sumber Daya Manusia), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini TK dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi sebagai aset yang bernilai dan dapat dikembangkan (seperti halnya portfolio investasi) dan juga bukan sebagai beban atau *cost*. Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Keberhasilan suatu entitas sangat dipengaruhi oleh kompetensi TK yang dimiliki untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. (Sholohah *et al.*, 2019)

Keberadaan kompetensi sumber daya manusia yang unggul akan menghasilkan laporan keuangan yang unggul (Agung & Gayatri, 2018). Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Karsana & Suaryana (2017) yang menyatakan bahwa tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang unggul pasti dapat bekerja secara optimal sehingga tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dengan baik, termasuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam Indriasari dan Ertambang (Nahartyo, 2008), Hevesi (2005) menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu ciri khas individu yang memiliki *skill*, *knowledge*, dan *ability* untuk menjalankan pekerjaan. Menurut Yensi (2014), kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh

seseorang dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam tugasnya. (Ardianto & Eforis, 2019) mengutip Widodo (2001) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Sumber daya manusia yang berkompeten akan dapat memahami logika akuntansi dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh aqin & Jatmiko, 2018, Indrayani & Widiastuti, 2020, Binawati, 2022 dan Sundari & Rahayu, 2019 Kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **2.3.3 Pengaruh Sitem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian internal adalah metode untuk mengontrol kinerja sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dan sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (penipuan). Permendagri No. 59 tahun 2009 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan pemerintah daerah yang tercermin dalam laporan keuangan yang andal, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun sektor publik seperti organisasi pemerintah.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, menyatakan

bahwa sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, adanya penemuan terkait penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK menunjukkan bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah daerah yang belum memenuhi karakteristik atau nilai informasi yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa komponen di dalam SPI meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan adanya komponen tersebut, diharapkan segala kegiatan operasional pada instansi dapat dilakukan dengan mudah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengendalian yang baik dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai sehingga dapat menghindari risiko terjadinya kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian. Menurut (Karsana & Suaryana, 2017) Adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka segala kegiatan terutama dibidang keuangan akan berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

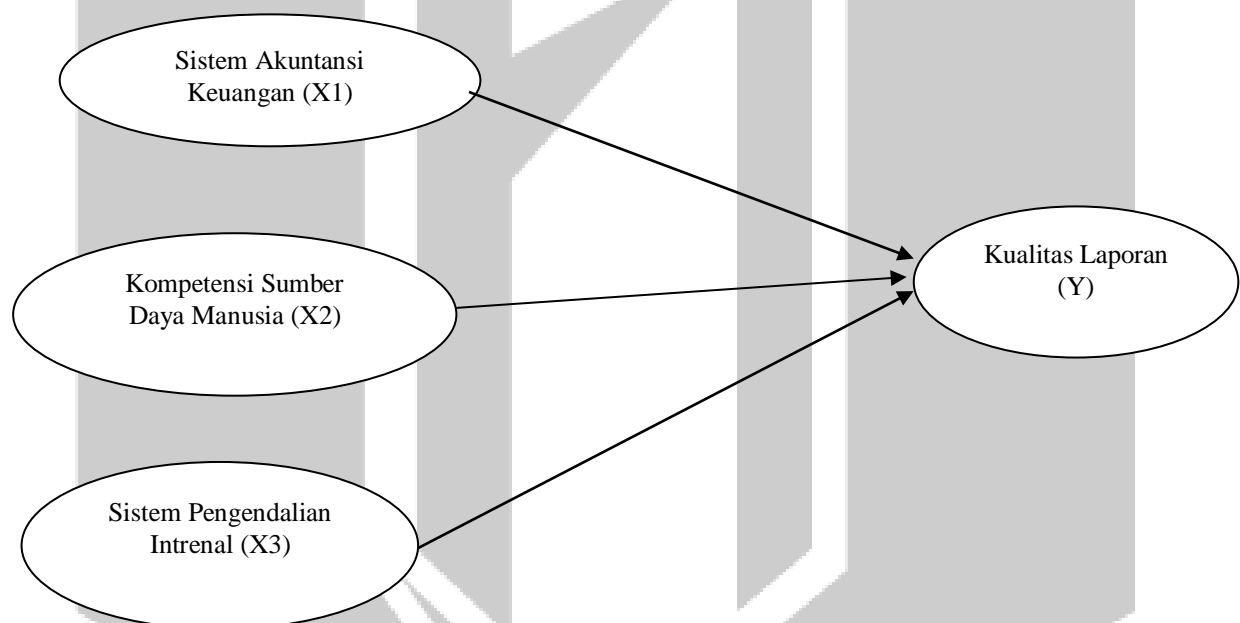
Pelaksanaan Pengendalian internal yang efektif pasti akan memberikan dampak yang signifikan pada semua kegiatan. Hal ini ditekankan pada pengelolaan keuangan daerah yang berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dan

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan uraian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di atas, dapat diketahui apabila sistem pengendalian intern dilaksanakan dengan baik maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Yaqin & Jatmiko, 2018, Indrayani & Widiastuti, 2020, Febrian Haty Ramadhan, 2018, Sundari & Rahayu, 2019 Sujana *et al.*, 2020, Hidayah, 2018, dan Muthaher, 2019 Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



#### 4.5 Hipotesis

Hipotesis Penelitian tersebut yaitu merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga dikarenakan masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teori, penelitian sebelumnya, dan hubungan antar variabel di

atas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

H3: Sistem pengendalian internal Berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah